

# KRIMINALISASI PERILAKU MENYIMPANG HUBUNGAN SEKS SESAMA JENIS DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

UMI PARMINI

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kriminalisasi perilaku menyimpang hubungan seks sesama jenis ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kebijakan kriminalisasi terhadap penyimpangan perilaku seksual yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia. *Teori yang digunakan* adalah teori hukum pidana, teori hukum positivism, dan teori penegakan hukum. *Metode penelitian* yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari teori atau kaidah hukum yang ada. *Hasil penelitian* ini dirumuskan bahwa untuk melakukan pembenahan dan pembangunan hukum pidana melalui penyusunan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana harus memperhatikan penggunaan hukum pidana terhadap tujuan pembangunan nasional, perbuatan yang diusahakan atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, serta penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil dan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum agar tidak terjadi kelampauan beban tugas. Pembentukan norma baru dalam hukum pidana itu bisa dimaknai sebagai salah satu upaya kriminalisasi. Kriminalisasi yang bisa dimaknai sebagai suatu sarana dalam hukum untuk membuat suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana guna mengendalikan kejahatan. *Simpulan* ; bahwa adanya kekosongan hukum tersebut diperlukan pembentukan norma baru dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang dapat mengkriminalisasikan perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa baik antar laki-laki dewasa sesama jenis, maupun antar perempuan dewasa sesama jenis. Diperlukannya kebijakan kriminalisasi dianalisis melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap penyimpangan perilaku seksual sesama jenis diperlukan adanya tinjauan secara mendalam pada perspektif sosiologis dari situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia dimana Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara maka perbuatan cabul sesama jenis dengan seiring semakin maraknya kegiatan LGBT di Indonesia merupakan kegiatan terlarang yang termasuk delik kesusilaan harus berorientasikan pada nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

# **CRIMINALIZING ABOUT RELATIONSHIP BEHAVIOR PEOPLE SEX IN PERSPECTIVE CRIMINAL LAW UPDATES**

**UMI PARMINI**

## **ABSTRACT**

This study aims to find out and explain about the criminalization of deviant behavior of same-sex relations in terms of the perspective of criminal law reform in Indonesia, as well as to find out and explain the criminalization policy against sexual behavior deviations in accordance with the situation and conditions of society in Indonesia. The theories used are criminal law theory, positivism legal theory, and law enforcement theory. The research method used is descriptive analysis method, which is an attempt to collect and compile data, then an analysis of the data is carried out. The data that has been collected are then analyzed using the deductive method, namely a way of thinking that departs from existing theories or legal principles. The results of this research are formulated that in order to reform and develop criminal law through the preparation of laws that include criminal provisions, the use of criminal law against the objectives of national development must be considered, actions attempted or overcome by criminal law must constitute undesirable actions, as well as the use of criminal law. law enforcement agencies must consider the principle of cost and yield and the capacity or capacity of the work of law enforcement agencies so that there is no overstatement of duties. The formation of new norms in the criminal law can be interpreted as an effort to criminalize. Criminalization which can be interpreted as a means in law to make an act that was not previously a criminal act becomes a criminal act in order to control crime. Conclusion; that this legal vacuum requires the formation of new norms in the perspective of reforming criminal law in Indonesia that can criminalize same-sex sexual immorality between adults, both between adult men of the same sex, and between adult women of the same sex. The need for a criminalization policy to be analyzed through positive law in effect in Indonesia against same-sex sexual behavior deviations requires an in-depth review of the sociological perspective of the situation and condition of society in Indonesia where Indonesia is a rule of law that places the principle of Almighty God as the main principle, as well as values. -the religious values that underlie the movement of the life of the nation and the state, then same-sex obscenity along with the increasing prevalence of LGBT activities in Indonesia is a prohibited activity which includes offenses of decency that must be oriented towards the values of morality that live in society which originate from religious and moral values who live in the midst of society.